

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan pembahasan dan analisis untuk menjawab Efektivitas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Kelompok Wanita Tani di Kota Tangerang Selatan. Program peningkatan diversifikasi pangan tersebut adalah salah satu strategi Kementerian Pertanian untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. Program peningkatan diversifikasi pangan melalui kegiatan P2L ini dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Pasal 26 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bagi rumah tangga, sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, serta berorientasi pasar guna meningkatkan pendapatan keluarga. Program P2L dianggap efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan karena masyarakat di dorong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi secara mandiri, bahkan dengan lahan terbatas. Selain itu, P2L adalah program pemerintah di sektor ketahanan pangan yang dapat diterapkan di kawasan perkotaan maupun pedesaan sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan program P2L.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah di provinsi Banten yang mendapatkan bantuan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada tahun 2023. Pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dilakukan oleh kelompok wanita tani selaku penerima program. Adapun KWT yang dipilih sebagai penerima program, yaitu KWT Mangifera Nuri di Kelurahan Pondok Ranji dan KWT Mentari di Kelurahan Benda Baru. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, kegiatan P2L Tahun Anggaran 2023 hanya dilaksanakan melalui tahap penumbuhan

saja dengan alokasi anggaran untuk Kota Tangerang Selatan adalah Rp 50.000.000, - yang realisasinya dibagi menjadi 2 (dua) termin, yaitu masing-masing 50 persen. Adapun pelaksanaan komponen kegiatan P2L tahap penumbuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Komponen Kegiatan P2L

No.	Uraian Kegiatan	
1.	Pengadaan sarana pembibitan	
	a.	Penyediaan bangunan rumah bibit
	b.	Penyediaan media tanam dan sarana produksi
	c.	Penyediaan benih sayuran dan tanaman obat
	d.	Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan
2.	Pengembangan Demplot	
	a.	Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot
	b.	Penyediaan peralatan pengairan
	c.	Penyediaan media tanam dan sarana produksi
	d.	Pembuatan plang nama kelompok
3.	Pertanaman	
	a.	Penyediaan media tanam dan sarana produksi
	b.	Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman
4.	Kegiatan pascapanen	
	a.	Jumlah kegiatan P2L
5.	Operasional P2L	
	a.	Pertemuan koordinasi
	b.	Pelatihan
	c.	Pendampingan
	d.	Pengawasan
	e.	Pelaporan

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tabel 1.5 diketahui bahwa keberhasilan program P2L sangat tergantung pada setiap komponen ini dilaksanakan. Pengadaan sarana yang tepat, pengelolaan demplot yang efektif, serta keberlanjutan kegiatan pertanaman dan pascapanen adalah fondasi bagi tercapainya tujuan ketahanan pangan. Kegagalan di salah satu komponen dapat mempengaruhi keberhasilan keseluruhan program. Tahapan ini membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan dari semua pihak, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan program P2L

berjalan efektif dan memberikan dampak nyata pada pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.

Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan tingkat sejauh mana organisasi, program, atau kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dibahas dan dianalisis menggunakan teori efektivitas program menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985) yang akan disajikan berdasarkan 3 (tiga) variabel, meliputi: 1) Pencapaian Tujuan, 2) Integrasi, dan 3) Adaptasi. Yang akan dijelaskan sebagai berikut.

5.1 Pencapaian Tujuan

Menurut Duncan dalam Steers (1985) keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan bagian-bagiannya atau pentahapan dalam arti periodisasinya. Dalam upaya pencapaian tujuan ini terdapat beberapa proses atau pentahapan yang harus dilakukan antara lain kurun waktu pencapaian tujuan, sasaran yang merupakan target konkrit, dan adanya dasar hukum dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut.

5.1.1 Kurun waktu pencapaian

Penelitian ini terlebih dahulu akan membahas temuan tentang kurun waktu pencapaian program dalam kegiatan P2L yang dilaksanakan pada KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari. Temuan penelitian baik berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap standar waktu operasional dalam program P2L menetapkan waktu pelaksanaan program P2L sesuai APBD adalah 1 tahun. Namun, di dalam praktiknya, salah satu informan, informan 1 (satu) menyatakan bahwa baik di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari pelaksanaan kegiatan P2L Tahun Anggaran 2023 pada termin pertama yang awalnya direncanakan dimulai pada awal triwulan kedua atau sekitar bulan April 2023 untuk pencairan Tahap I, mengalami kemunduran jadwal sehingga baru dapat dilaksanakan pada triwulan ketiga sehingga pencairan Tahap I baru dilakukan sekitar bulan Agustus 2023. Sementara pelaksanaan termin

kedua dilaksanakan pada triwulan keempat, yakni November 2023 untuk pencairan Tahap II.

Adanya keterlambatan pencairan dana menyebabkan semua aktivitas pada KWT Mangifera Nuri maupun KWT Mentari menjadi mundur sehingga memaksa pelaksanaan kegiatan ke dalam waktu yang lebih padat. Informan 1 (satu) telah menjelaskan bahwa situasi tersebut disebabkan adanya oleh adanya perubahan sub kegiatan di awal tahun pelaksanaan. Perubahan sub kegiatan ini berdampak pada revisi dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), karena perencanaan anggaran harus disusun setahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Namun, petunjuk teknis baru diterbitkan pada awal tahun pelaksanaan program, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menyesuaikan sub kegiatan sesuai dengan juknis tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan keterlambatan pencairan dana, yang pada akhirnya juga mempengaruhi waktu dimulainya pelaksanaan program P2L.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, diketahui bahwa waktu pelaksanaan P2L di Kota Tangerang Selatan belum sesuai dengan pasal 28 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Bahwa menurut peraturan tersebut seharusnya untuk penyaluran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan untuk tahap I paling cepat disalurkan bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi, sementara melihat hasil implementasi di lapangan bahwa tahap I pencairan dana justru dilakukan pada bulan Agustus 2023. Selanjutnya untuk tahap II paling cepat disalurkan bulan Juli dan paling lambat bulan November sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi, namun saat implementasi, pencairan tahap II baru disalurkan bulan November 2023. Dengan demikian pelaksanaan program P2L Tahun 2023 di Kota Tangerang Selatan belum dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Keberhasilan pelaksanaan program P2L sangat bergantung pada stabilitas kebijakan dan dukungan administrasi yang konsisten. Ketika kebijakan berubah di tengah jalan, tim pelaksana di lapangan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan

baru yang sering kali memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian prosedur dan koordinasi. Keterlambatan dalam pelaksanaan tidak hanya mempengaruhi *timeline* tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian pada penerima manfaat program. Dalam hal ini, pelaksanaan penanaman dan pemanfaatan lahan pekarangan di Kota Tangerang Selatan menjadi tidak tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi hasil produksi pangan dan keberlanjutan ketahanan pangan di tingkat lokal.

Untuk mengatasi dampak adanya perubahan kebijakan, maka ke depannya diperlukan fleksibilitas dari pihak pelaksana program serta komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, maupun penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat terinformasi dengan baik mengenai perubahan, dampaknya serta dapat beradaptasi dengan cepat untuk meminimalkan gangguan dalam pelaksanaan program.

5.1.2 Sasaran program

Lebih lanjutnya penelitian ini membahas temuan mengenai sasaran program yang diterima oleh penerima manfaat program, yaitu kelompok wanita tani (KWT). Menurut Steers (1985), sasaran program adalah salah satu indikator untuk menilai program dengan cara melihat apakah tujuan-tujuan spesifik yang dirancang untuk diimplementasikan dalam suatu program dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian baik observasi terhadap sasaran program P2L dan wawancara dengan pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan, Pendamping program P2L, dan kelompok penerima manfaat yaitu kelompok wanita tani (KWT), sasaran yang diharapkan dari program P2L dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5.2 Sasaran Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

No.	Sasaran Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
1.	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari.
2.	Komitmen dalam perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dengan anak <i>stunting</i> untuk mendukung upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> .
3.	Memanfaatkan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal dan pengelolaan hasil pertanian untuk masa depan.

4.	Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan.
5.	Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan keluarga dari hasil pemanfaatan pekarangan.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti.

Merujuk pada tabel 5.2 diketahui bahwa dari hasil wawancara dengan pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan dan pendamping program P2L dikemukakan bahwa sasaran-sasaran tersebut belum sepenuhnya tercapai. Namun saat ini sasaran yang baru diwujudkan oleh KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota tani melalui optimalisasi lahan pekarangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program P2L di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari masih terbatas pada lingkup internal anggota kelompok dan masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan lokasi kegiatan. Meskipun program P2L berhasil meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, namun dampaknya belum menyentuh masyarakat yang lebih luas. Hal ini memperlihatkan bahwa program P2L belum sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya terutama dalam memperluas jangkauan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan komunitas secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan strategi distribusi serta pengelolaan hasil pertanian perlu dilakukan agar manfaat P2L dapat dirasakan oleh lebih banyak orang, termasuk keluarga yang rentan terhadap masalah pangan seperti *stunting*.

Sementara dari perspektif sasaran dalam peningkatan gizi *stunting*, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa program P2L di Kota Tangerang Selatan belum dapat berkontribusi atau mendukung posyandu dalam menyediakan makanan tinggi protein hewani bagi balita karena hasil produksi P2L di Kota Tangerang Selatan pada saat ini tidak mengarah pada kontribusi pemenuhan makanan sehat seperti protein hewani dan buah-buahan. Hasil produksi KWT baru berbasis pangan lokal seperti kangkung bangkok, pakcoy, jagung manis bonanza, kacang panjang, bayam hijau maestro, cabai rawit pelita, jagung pulut hibrida (ungu).

Berdasarkan temuan penelitian diatas, hasil produksi yang tidak mencakup buah-buahan dan protein hewani menunjukkan bahwa meskipun ada diversifikasi tanaman, tetapi fokus P2L saat ini lebih pada sayuran dan produk lokal yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi lengkap, termasuk kebutuhan protein hewani untuk balita *stunting*. Informan 8 (delapan) dan 9 (sembilan) selaku informan dari keluarga dengan anak *stunting* mengkonfirmasi bahwa pemberian makanan tambahan (PMT) saat ini dilakukan oleh PKK selaku Pokja 4 dan belum terintegrasi dengan KWT. Hal ini disebabkan oleh kegiatan P2L di Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan pada keterbatasan lahan demplot kelompok, yaitu hanya sebesar 200m² sedangkan demplot tersebut dimanfaatkan oleh 30 anggota KWT di dalamnya sehingga apabila hasil produksi dibagikan kepada masyarakat luas selain anggota kelompok dan warga sekitar maka tidak akan mencukupi.

Merujuk pada penelitian yang telah dikemukakan di atas diketahui bahwa sasaran program dari kegiatan P2L yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan baik pada KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari belum dapat terwujud secara maksimal sesuai dengan tuntutan sasaran program yang ditetapkan pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 2023 karena sasaran yang ditetapkan di dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan P2L adalah salah satunya mampu meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada kab/kota lokus intervensi penurunan *stunting* Tahun 2023 sesuai yang telah ditetapkan oleh Bappenas. Hal ini terlihat dari hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari baru mampu meningkatkan aksesibilitas dan juga pemanfaatan lahan pekarangan untuk mengembangkan komoditas sayuran.

Disamping itu, temuan dari hasil wawancara dengan berbagai informan juga di dapati bahwa sasaran dalam meningkatkan pendapatan belum dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang ada di dalam Petunjuk Pelaksanaan Program P2L tahun 2023. Sasaran ini dikatakan belum tercapai karena orientasi kelompok wanita tani di Kota Tangerang Selatan masih bersifat organisasi sosial. Dimana keuntungan dari hasil produksi yang dijual akan dimasukkan ke dalam kas kelompok sebagai biaya

operasional, bukan sebagai pendapatan langsung bagi anggota tani. Untuk saat ini fokus P2L adalah meningkatkan jumlah produksi terlebih dahulu sehingga apabila kebutuhan pangan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar kelompok sudah terpenuhi, maka selanjutnya hasil produksi bisa dibagikan kepada masyarakat luas.

Secara keseluruhan, pencapaian tujuan program dilihat dari aspek sasaran program maka merujuk pada tabel 4.1 didapati bahwa dari 5 sasaran yang ingin diwujudkan, hanya 2 sasaran yang telah berhasil dicapai oleh kelompok penerima manfaat. Sasaran tersebut adalah pemanfaatan lahan pekarangan melalui pelestarian tanaman pangan lokal dan pengelolaan hasil pertanian, serta pengembangan sumber benih secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan dalam pencapaian tujuan program secara keseluruhan, di mana tiga sasaran lainnya, yaitu penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dan masyarakat, komitmen dalam mendukung program penanganan *stunting*, dan meningkatkan pendapatan keluarga dari hasil pemanfaatan lahan belum berhasil. Ketidakberhasilan dalam mencapai tiga sasaran lainnya mengindikasikan bahwa strategi yang digunakan di dalam pelaksanaan program tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan penyesuaian strategi agar program P2L dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

5.1.3 Dasar hukum

Selanjutnya penelitian ini akan membahas temuan mengenai dasar hukum sebagai indikator dalam pencapaian tujuan suatu program. Temuan penelitian baik berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan tidak memiliki dasar hukum khusus yang mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan P2L sehingga dasar hukum yang digunakan oleh DKP3 Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program P2L Tahun Anggaran 2023 adalah peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dan dasar hukum Berita Acara Penunjukan Lokus *Stunting* dari Wali Kota Tangerang

Selatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050/Kep.174-Huk/2022. Tanpa peraturan turunan yang khusus ditetapkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, maka pelaksanaan P2L tidak memiliki dasar hukum lokal yang jelas dan menyebabkan program ini lebih bergantung pada kebijakan nasional dan keputusan-keputusan sementara (*ad hoc*) yang membuat koordinasi di Kota Tangerang Selatan menjadi kurang optimal dan terarah.

Dari temuan penelitian, ditegaskan oleh informan 1 (satu) bahwa perubahan sub kegiatan dalam kegiatan P2L sudah terjadi tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021 sehingga pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menyesuaikan kembali penyeragaman sub kegiatan baru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tanpa regulasi daerah yang lebih spesifik, program P2L di Kota Tangerang Selatan rentan terhadap kebijakan yang berubah-ubah dalam penyesuaian terhadap kondisi lokal dan cenderung bergantung pada aturan yang bersifat umum sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya terfokus pada kebutuhan lokal atau tidak berjalan dengan efektif sesuai wilayah setempat.

Ketiadaan peraturan turunan di Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program P2L menyebabkan Kota Tangerang Selatan harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan P2L. Peraturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian tersebut memuat petunjuk teknis yang mengatur penggunaan dana alokasi khusus non fisik dinas ketahanan pangan dan pertanian, dimana penggunaan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budidaya pertanian di pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan.

Meskipun Kota Tangerang Selatan tidak memiliki peraturan turunan yang spesifik mengatur pedoman kegiatan P2L, namun Kota Tangerang Selatan memiliki dasar hukum yang mengatur upaya penganekaragaman pangan melalui optimalisasi pekarangan di Kota Tangerang Selatan, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g. Perda tersebut mengamanatkan dengan adanya

program optimalisasi lahan pekarangan, Kota Tangerang Selatan ingin mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan mendorong masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan lokal. Peraturan tersebut memberikan kerangka yang lebih luas untuk pelaksanaan program P2L, meskipun tidak secara spesifik mengatur detail program tersebut. Dengan adanya regulasi tersebut, Kota Tangerang Selatan tetap memiliki pedoman hukum untuk mendorong diversifikasi pangan melalui pemanfaatan lahan yang mendukung program P2L. Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan peraturan turunan tetap penting agar pelaksanaan program P2L dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan merujuk pada Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050/Kep.174-Huk/2022 yang memuat berita acara penentuan kelurahan sebagai lokus prioritas percepatan dan penurunan *stunting* pada tahun 2023. Keputusan wali kota tersebut memastikan bahwa program P2L di Kota Tangerang Selatan ditempatkan di lokasi yang tepat sasaran sesuai dengan kebijakan percepatan penurunan *stunting*.

Secara keseluruhan, pencapaian tujuan program P2L dilihat dari aspek dasar hukum bahwa program P2L di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya efektif. Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung upaya diversifikasi pangan, seperti Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023, ketiadaan peraturan turunan yang lebih spesifik membuat pelaksanaan program ini kurang optimal. Regulasi yang lebih detail masih diperlukan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal dan memastikan implementasi yang lebih terarah serta berkelanjutan.

5.2 Integrasi

Proses integrasi yang efektif menunjukkan bahwa semua bagian organisasi bergerak menuju tujuan bersama dengan koordinasi yang kuat, aliran informasi yang lancar, dan kerja sama tim yang efektif, serta penggunaan sumber daya yang

optimal. Hal ini merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan program. Proses integrasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tiga indikator, meliputi pelaksanaan prosedur, proses sosialisasi, dan proses komunikasi.

5.2.1 Pelaksanaan prosedur

Penelitian ini terlebih dahulu akan membahas temuan tentang pelaksanaan prosedur. Temuan penelitian baik berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur program P2L dibuat oleh Kementerian Pertanian dengan panduan Juklak dan Juknis yang diperbarui setiap tahun. Adanya panduan Juklak dan Juknis tersebut menunjukkan bahwa program P2L telah memiliki kejelasan panduan untuk memastikan setiap tahapan program dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan.

Proses pengajuan program P2L di Kota Tangerang Selatan dimulai dengan penerimaan surat dari Kementerian Pertanian yang ditujukan kepada DKP3 Kota Tangerang Selatan. DKP3 kemudian menyusun proposal untuk menentukan KWT yang akan menjadi sasaran program P2L. Tahap berikutnya adalah pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) triwulanan oleh setiap kelompok. Selanjutnya, Dinas akan menunjuk pendamping yang bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan teknis dan pendamping kepada kelompok wanita tani (KWT) dalam pelaksanaan P2L. Setelah pengajuan RPD disetujui, Kementerian Pertanian akan melaksanakan monitoring dan evaluasi sebelum pelaksanaan kegiatan P2L dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan prosedur P2L ini telah menunjukkan adanya mekanisme kerja yang sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan setiap pihak yang terlibat untuk dapat memahami dan menjalankan tugasnya masing-masing. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses implementasi.

Pendampingan kegiatan P2L di Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh satu orang pendamping per kelompok. Pendamping bertugas membantu KWT dalam pengajuan administrasi, termasuk pengajuan SK kelompok, pembukaan rekening

atas nama kelompok, penyusunan AD/ART, hingga pengajuan dana bantuan P2L kepada Dinas Ketahanan Pangan yang ditandatangani oleh ketua kelompok, lurah, dan penyuluh pertanian. Adanya kejelasan tugas bagi pendamping ini menunjukkan adanya pedoman yang terdefinisi dengan baik, sehingga pendamping memahami peran dan tanggung jawab mereka. Selain itu, proses pendampingan administrasi ini mencerminkan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan legalitas dan kelancaran administrasi kelompok. Adapun komponen kegiatan dalam pemanfaatan lahan pekarangan, antara lain: pengadaan sarana rumah bibit, demplot (demonstrasi plot), kegiatan pertanaman pekarangan anggota, dan kegiatan pasca panen.

Dari hasil penelitian, juga ditemukan informasi dari DKP3 Kota Tangerang Selatan, informan 1 (satu), bahwa penerapan prosedur penggunaan rumah bibit di wilayah Tangerang Selatan menghadapi kendala. SOP mengenai pembangunan rumah bibit kurang efektif diterapkan di wilayah perkotaan seperti Tangerang Selatan karena suhu yang terlalu panas menyebabkan tanaman dalam kebun bibit menjadi kerdil tidak tumbuh optimal. Dalam hal ini teori Steers menggaris bawahi bahwa pentingnya prosedur yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh sebab itu, adaptabilitas menjadi hal penting dalam kondisi ini, karena meskipun SOP sudah di standarisasi, namun perlu juga adanya penyesuaian berdasarkan kondisi lokal, seperti perubahan struktur rumah bibit yang sesuai dengan iklim setempat. Tanpa adaptabilitas ini, maka prosedur standar bisa menjadi kurang efektif dan menghambat pencapaian tujuan program.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan prosedur dalam program P2L yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan telah memiliki standar operasional prosedur yang runtun mulai dari penetapan penerima manfaat oleh kepala dinas, penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L, Surat Keputusan (SK) Pendampingan kelompok P2L, penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) hingga pelaksanaan komponen kegiatan P2L yang saling terkait satu sama lain sehingga memudahkan para pelaksana program dan penerima program untuk mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta memastikan bahwa setiap langkah dilaksanakan oleh pihak yang tepat pada waktu yang tepat. Namun

pelaksanaan prosedur program P2L ini belum terlaksana dengan baik, sebab standar operasional pembangunan rumah bibit yang diterapkan di Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan kondisi wilayah yang memiliki cuaca yang panas.

Hal tersebut kemudian menyoroti perlunya revisi SOP untuk memperbaiki kendala yang dihadapi. Dengan mengaitkan dengan teori Steers (1985) pentingnya evaluasi berkelanjutan serta penyesuaian prosedur berdasarkan pada hasil lapangan. Kendala suhu yang terlalu panas mengindikasikan bahwa prosedur standar tidak dapat diterapkan secara universal dan perlu penyesuaian supaya dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian diharapkan dapat memberikan contoh langsung mengenai konsep rumah bibit yang tepat bagi kawasan panas. Implementasi contoh langsung ini akan membantu dalam evaluasi dan penyesuaian prosedur dilapangan.

5.2.2 Proses sosialisasi

Selanjutnya dalam integrasi yang baik, diperlukan proses sosialisasi untuk membangun komitmen dan keterlibatan sehingga setiap anggota merasa memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu program yang dijalankan (Steers, 1985). Temuan penelitian baik berdasarkan hasil wawancara, observasi terhadap proses sosialisasi, serta studi dokumentasi menunjukkan bahwa DKP3 Kota Tangerang Selatan telah melakukan sosialisasi langsung kepada KWT melalui surat undangan yang ditujukan kepada KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari terkait pertemuan koordinasi (operasional P2L). Dalam proses sosialisasi, DKP3 Kota Tangerang Selatan juga bekerja sama dengan tenaga penyuluh pertanian Jombang sebagai narasumber, dan pendamping program P2L.

Kegiatan sosialisasi dalam suatu program seharusnya tidak dilakukan hanya sebagai formalitas atau kewajiban administratif saja. Sebaliknya, sosialisasi harus memberikan dampak nyata kepada penerima program dengan memastikan adanya komitmen, keselarasan tujuan, komunikasi efektif, pemberdayaan, serta koordinasi dan kolaborasi yang sinergis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sosialisasi P2L di Kota Tangerang Selatan dilakukan dua kali dalam setahun. Pada sosialisasi

pertama, difokuskan pada pemaparan pedoman teknis, pengenalan pendamping, pembahasan batasan regulasi, serta penjelasan mengenai tantangan yang mungkin dihadapi kelompok. Penyampaian informasi yang menyeluruh pada tahap awal ini membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat dan mendukung kelompok penerima manfaat untuk lebih siap dalam melaksanakan program P2L.

Dari hasil kegiatan sosialisasi pertama, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa informan 6 (enam) dan 7 (tujuh) dari KWT Mangifera Nuri telah memahami cara bercocok tanam yang baik dan benar, baik tanaman yang tidak memerlukan penyemaian maupun yang memerlukan penyemaian. Selain itu, anggota telah mengetahui cara merawat tanaman sesuai dengan karakteristik masing-masing dan bagaimana mengatasi hama yang sering muncul pada tanaman yang ditanam oleh KWT. Sama halnya yang dirasakan oleh informan 4 (empat) dan 5 (lima) dari KWT Mentari, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah sosialisasi pertama, seluruh anggota telah memahami sepenuhnya prosedur awal pelaksanaan KWT. Hal ini terlihat dari kemampuan anggota KWT Mentari mempersiapkan lahan, melengkapi persyaratan administrasi, serta mempelajari RAB, khususnya mengenai material yang akan disediakan oleh program P2L. Selain itu, pengetahuan anggota juga telah berkembang perihal proses penanaman berbagai tanaman dan metode pascapanen atau pengolahannya.

Sementara, untuk sosialisasi kedua berfokus pada monitoring dan evaluasi (monev). Bentuk monev tersebut adalah meninjau kebun bibit dan demplot KWT, pekarangan anggota, pascapanen, memberi masukan, dan memantau administrasi laporan perkembangan kelompok. Monev dilakukan pada saat program P2L masih berjalan dengan tujuan melakukan perbaikan-perbaikan untuk kelanjutan program. Penilaian atau hasil yang diperoleh dari monev menjadi acuan selanjutnya. Dengan melakukan monev secara teratur, maka *feedback* dari lapangan dapat dikumpulkan dan dianalisis, sehingga memungkinkan adaptasi untuk meningkatkan efektivitas suatu program.

Berdasarkan hasil monev, baik KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari merasakan bahwa hadirnya kegiatan P2L memberikan banyak manfaat dikarenakan

selain untuk membantu menyediakan sumber pangan, sebagian hasil panen juga dijual sebagai sumber pendapatan kelompok untuk dijadikan biaya operasional. Bantuan sarana dan prasarana yang diberikan kepada KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari sudah dibelanjakan sesuai pada RAB dan bibit yang harus dibagikan kepada anggota sudah terealisasi. Anggota kelompok juga sudah memahami cara mengemas hasil produksi pertanian dengan kemasan yang menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut. Selama kegiatan monev, anggota diberikan kesempatan untuk mendiskusikan mengenai kendala yang dihadapi di lapangan dan mendapatkan bantuan untuk mengatasi kendala tersebut.

Selain melakukan sosialisasi berupa pertemuan koordinasi operasional P2L, pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan juga telah mengadakan pembinaan berupa pelatihan tematik atau budidaya kepada KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari. Dari pelatihan tematik tersebut, diketahui anggota kelompok baik KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari telah mendapat pengetahuan tentang pengolahan pupuk kompos organik agar dapat dimanfaatkan di lahan demplot kelompok. Selanjutnya, DKP3 juga telah melakukan pelatihan terkait peningkatan status kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pemahaman kelompok tani mengenai pertanian yang efektif, efisien, dan untuk mengetahui tata cara penerapan teknologi tepat guna dalam bertani.

Selama kegiatan sosialisasi, KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari telah mendapat bantuan dari pendamping kelompok masing-masing untuk memahami prosedur dari P2L. Walaupun pendampingan ini tidak memiliki jadwal pertemuan yang rutin, tetapi pendampingan bisa dilakukan secara daring melalui *Whatsapp Group* sehingga anggota KWT dapat mengajukan pertanyaan atau menyampaikan laporan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa sosialisasi P2L di Kota Tangerang Selatan telah dilengkapi oleh mekanisme komunikasi baik secara langsung ataupun daring.

Merujuk pada penelitian yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa proses sosialisasi yang telah dilakukan DKP3 Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan P2L tahun 2023. Sebagaimana disebutkan dalam

Lampiran II Permentan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 bahwa di dalam Operasional kegiatan P2L harus terdapat kegiatan: 1) Pertemuan koordinasi berupa pertemuan dengan mengundang narasumber dan kelompok P2L berkaitan dengan koordinasi, sosialisasi kegiatan P2L, 2) Pelatihan berupa *workshop* atau pelatihan dan bimbingan teknis terkait kegiatan P2L baik budidaya maupun pascapanen untuk peningkatan kapabilitas anggota kelompok P2L, 3) Pendampingan kegiatan P2L ke kelompok, 4) Pengawasan berupa identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan P2L, dan 5) Pelaporan kegiatan P2L per kelompok.

Berdasarkan hal penelitian yang sudah dikemukakan di atas bahwa pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan sosialisasi dengan baik sesuai indikator proses sosialisasi menurut Steers. Hal ini didasari pada adanya kejelasan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan P2L yang disampaikan oleh dinas, tenaga penyuluh lapangan, dan pendamping melalui pertemuan koordinasi (operasional P2L). Kegiatan tersebut adalah langkah awal untuk memastikan anggota kelompok terlibat dan mengenal program P2L serta sebagai upaya untuk mempersiapkan anggota dalam memahami persyaratan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, proses sosialisasi yang diadakan tersebut telah mencerminkan adanya penerimaan peran yang menunjukkan bahwa DKP3 tidak hanya memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab anggota, tetapi juga memfasilitasi pengenalan peran mereka dalam implementasi program.

5.2.3 Komunikasi peningkatan pengetahuan KWT

Selain proses sosialisasi, dalam menilai efektif atau tidaknya suatu program, perlu juga dilakukan komunikasi antara pelaksana dan penerima program dengan maksud memastikan bahwa kedua belah pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang tujuan, manfaat, dan prosedur program P2L. Komunikasi yang dimaksud adalah langkah yang dilakukan oleh pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan, tenaga penyuluh, dan pendamping program P2L untuk meningkatkan kemampuan seluruh anggota kelompok dalam memanfaatkan lahan perkarangan.

Untuk menjalin komunikasi dengan KWT, pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan melakukan dua kali pengadaan sosialisasi dan dua kali pelatihan tematik. Kegiatan sosialisasi tersebut mencerminkan adanya usaha yang terstruktur untuk menjamin bahwa semua anggota kelompok mempunyai pemahaman yang jelas tentang pedoman teknis dan peraturan yang berhubungan dengan program P2L. Selain itu, pelatihan ini berperan sebagai wadah untuk mengatasi berbagai kendala dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari para peserta. Sedangkan, untuk para pendamping dalam upaya menjalin komunikasi peningkatan pengetahuan para KWT biasanya melakukan penyuluhan atau bimbingan teknis dengan anggota KWT. Kegiatan ini merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran dan transfer pengetahuan yang memungkinkan anggota KWT dapat mempraktikkan teknik yang benar dalam pemanfaatan lahan pekarangan.

Dari hasil penelitian, juga ditemukan informasi bahwa pendamping KWT Mangifera Nuri telah secara konsisten mendampingi anggota KWT Mangifera Nuri dalam memberikan edukasi mulai dari pemilihan bibit, teknik penanaman, hingga perawatan tanaman. Koordinasi yang terjalin antara anggota dengan pendamping KWT Mangifera Nuri sudah dikatakan baik, hal ini terlihat dari para anggota KWT Mangifera Nuri secara aktif terlibat dalam kegiatan pertemuan, pelatihan, maupun bimbingan teknis. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendamping program dari KWT Mangifera Nuri telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anggota untuk belajar dan menerapkan pengetahuan baru.

Sementara itu, berbeda halnya dengan KWT Mentari, ditemukan informasi dari hasil monitoring dan evaluasi bahwa peran pendamping di KWT Mentari tidak berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu informan dari KWT Mentari yang mengatakan bahwa pendamping KWT Mentari jarang melakukan kunjungan langsung ke kelompok. Pendamping hanya hadir pada awal program untuk mengontrol kegiatan, namun ketika pembangunan rumah bibit selesai, keterlibatan pendamping dalam mengontrol, mengawasi, dan memberikan pendampingan terlihat berkurang. Untuk mengatasi keterbatasan ini, KWT Mentari

mengambil inisiatif untuk belajar secara mandiri ketika menghadapi permasalahan dilapangan.

Dalam kasus KWT Mentari, terlihat bahwa terdapat kelemahan dalam aspek koordinasi dan komunikasi antara pendamping dengan anggota KWT. Pendamping seharusnya menjalankan tugas dan peran mereka sepanjang pelaksanaan program sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat penunjukan. Tanpa pendampingan yang kontinu, anggota kelompok tani tidak akan menerima bimbingan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan program. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah evaluatif untuk memperbaiki kelemahan dalam aspek pengawasan tersebut, salah satunya dengan memberikan pelatihan lanjutan kepada pendamping program untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan yang efektif. Pelatihan ini mencakup pelatihan teknik komunikasi dan manajemen kelompok. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja pendamping program. *Feedback* dari anggota mengenai pendampingan yang mereka terima, dapat digunakan sebagai perbaikan. Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif bagi pendamping yang menunjukkan komitmen yang tinggi dan kinerja yang baik. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam program.

Berdasarkan penelitian yang sudah dikemukakan di atas bahwa efektivitas program P2L sangat dipengaruhi oleh kualitas dan konsistensi komunikasi, serta pendampingan. Integrasi yang baik antara pihak DKP3, pendamping, dan anggota KWT, seperti yang ditunjukkan pada KWT Mangifera Nuri, dapat meningkatkan keberhasilan program. Namun sebaliknya, kurangnya integrasi, seperti yang terlihat pada KWT Mentari, menunjukkan bahwa program memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan koordinatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sesuai dengan prinsip-prinsip integrasi dari Steers (1985), yaitu pentingnya koordinasi, komunikasi, dan partisipasi aktif dalam mencapai efektivitas program

Merujuk pada penelitian yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa sudah ada komunikasi yang terjalin antara DKP3 Kota Tangerang Selatan, penyuluh, dan pendamping program dengan KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari, sehingga

semua aktivitas yang ada di kelompok terutama pada bercocok tanam tidak terlepas dari komunikasi yang terbentuk. Namun pencapaian dari program tersebut belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan masih adanya KWT yang belum menerima komunikasi intensif dari pendamping dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

5.3 Adaptasi

Melalui adaptasi, program mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menemukan solusi yang relevan, mengembangkan kapasitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan meningkatkan keterlibatan stakeholder. Indikator adaptasi dalam pelaksanaan program P2L dapat dilihat dari dua faktor, yaitu peningkatan kemampuan dan kelengkapan sarana dan prasarana.

5.3.1 Peningkatan kemampuan

Peningkatan kemampuan yang dimaksud adalah melibatkan pengembangan keterampilan anggota dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengelola sumber daya secara efisien dan mencapai tujuan program P2L secara berkelanjutan. Salah satu aspek peningkatan kemampuan yang perlu dipahami dan dikuasai oleh anggota kelompok tani adalah pengelolaan hama, hal ini karena pengelolaan hama yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan memastikan hasil panen yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian baik wawancara dan observasi didapati bahwa dalam rangka meningkatkan keterampilan KWT dalam mengatasi masalah hama, DKP3 Kota Tangerang Selatan telah mengorganisir kehadiran Petugas Organisasi Pengganggu Tanaman (POPT) dari Provinsi Banten untuk memberikan bantuan kepada kelompok terkait pengendalian hama dan penyakit tanaman. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa DKP3 Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan kemampuan adaptasi dengan memahami dan menanggapi kebutuhan lokal KWT. DKP3 Kota Tangerang Selatan menyadari bahwa permasalahan hama dan penyakit tanaman adalah kendala signifikan yang perlu diatasi untuk keberhasilan program.

Selain menghadirkan POPT, Bidang Pertanian juga mengadakan pelatihan mengenai penggunaan pestisida organik untuk mendukung pelaksanaan program P2L. Pelatihan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis anggota KWT, tetapi juga memastikan bahwa praktik pertanian yang anggota KWT lakukan selaras dengan kebijakan lingkungan yang lebih luas.

Adaptasi melibatkan penyesuaian strategi, struktur, dan perilaku agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika menghadapi masalah, biasanya baik KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari terlebih dahulu berkoordinasi dengan pendamping untuk menyelesaikan suatu persoalan, termasuk permasalahan hama. Selain mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas, anggota KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari juga melakukan pembelajaran mandiri melalui internet untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman. Misalnya, ketika menghadapi kendala seperti faktor lingkungan atau cuaca, KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari mengatasinya dengan penyemprotan pestisida, penggunaan bahan organik untuk pengendalian hama, ataupun pemagaran untuk melindungi tanaman. Strategi tersebut dipilih dan diterapkan berdasarkan kondisi spesifik yang dihadapi, hal ini menunjukkan KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Pembelajaran secara mandiri ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi individu dan kelompok dalam menghadapi masalah yang tidak terduga.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan baik melalui hasil wawancara dan observasi terhadap peningkatan kemampuan anggota bahwa dalam pelaksanaan kegiatan P2L, KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari telah difasilitasi oleh pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan dengan pengetahuan tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dari Provinsi Banten. Sebagian besar anggota KWT saat ini telah mampu memahami dan memiliki strategi untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman.

5.3.2 Kelengkapan sarana dan prasarana

Selain peningkatan kemampuan, adaptasi dalam pelaksanaan program P2L juga dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi terhadap kelengkapan sarana dan prasarana pendukung program P2L, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa penerapan teknologi pada program P2L di Kota Tangerang Selatan yang saat ini masih terbatas pada teknik hidroponik. Teknologi seperti aquaponik (memadukan budidaya ikan dan tanaman) dan tabulampot (tanaman buah dalam pot) belum diadopsi oleh KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari yang menandakan adanya keterbatasan dalam mengadaptasi teknologi pertanian yang lebih maju.

Informan 1 (satu) menegaskan bahwa dari segi prioritas, penerapan inovasi seperti aquaponik dan tabulampot dalam program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Tangerang Selatan belum menjadi fokus utama saat ini. Hal ini disebabkan implementasi inovasi pertanian seperti aquaponik dan tabulampot membutuhkan investasi lebih besar, baik dalam hal pelatihan, peralatan, maupun pemeliharaan. Oleh karena itu, teknologi sederhana seperti hidroponik lebih mudah diterima dan diterapkan oleh anggota KWT yang tidak memiliki pengalaman teknis mendalam. Meskipun inovasi aquaponik dan tabulampot belum menjadi prioritas, namun adopsi teknologi ini tetap penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Penerapan teknologi yang beragam akan membantu meningkatkan produktivitas, diversifikasi komoditas, dan ketahanan pangan sehingga dapat diprioritaskan seiring dengan kemajuan program dan kesiapan sumber daya

Selain itu, temuan penelitian berdasarkan studi dokumentasi terkait sarana dan prasarana diketahui bahwa dalam rencana kebutuhan anggaran (RKA) yang diajukan untuk kegiatan P2L baik di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari masih berbasis konvensional, seperti cangkul, selang air, sekop, dan sarung tangan karet, hal ini karena pengadaan modernisasi alat-alat pertanian bukan kebutuhan prioritas dalam kegiatan P2L. Modernisasi alat-alat pertanian yang dimaksud misalnya seperti *solenoid valve* yang berfungsi sebagai penutup dan pembuka kran air, dan disinfektan secara otomatis. Lainnya, seperti alat pemrosesan pascapanen, yaitu

vacuum sealers yang berfungsi sebagai pengemasan hasil panen agar tahan lebih lama. Walaupun sebenarnya modernisasi alat-alat pertanian ini sudah diterapkan di Kota Tangerang Selatan, namun untuk kegiatan P2L, sarana dan prasarana modern tersebut belum dapat diterapkan.

Sarana dan prasarana yang masih berbasis konvensional seperti yang telah dipaparkan diatas disebabkan oleh anggaran program yang terbatas karena apabila merujuk kepada RKA terlihat bahwa pengembangan demplot dan pembangunan rumah bibit merupakan kegiatan yang membutuhkan anggaran yang besar sehingga pengadaan alat modern menjadi kurang prioritas. Alokasi anggaran program P2L lebih diarahkan pada kegiatan inti seperti rumah bibit dan demplot yang berfungsi langsung dalam mendukung tujuan utama program. Sementara itu, temuan lainnya dalam penelitian justru menunjukkan bahwa pemanfaatan rumah bibit baik di KWT Mangifera dan KWT Mentari masih belum optimal karena jarang digunakan. Hal ini disebabkan oleh suhu dalam rumah bibit yang terlalu panas, sehingga menjadi tidak efektif apabila menanam di dalam rumah bibit. Sebagai alternatif, penanaman dialihkan ke lahan terbuka atau menggunakan wadah seperti *planter bag*, *poly bag*, maupun *tray* semai.

Temuan ini menunjukkan bahwa investasi dalam pembangunan rumah bibit belum memberikan hasil yang optimal, baik dari segi penggunaan dan manfaatnya bagi kelompok wanita tani (KWT). Dari perspektif keuangan, hal ini mencerminkan ketidakefisienan dalam alokasi dana program, di mana anggaran yang besar tidak di ikuti dengan pemanfaatan yang maksimal. Hal tersebut menandakan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan kebutuhan di lapangan sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat malah terpakai untuk fasilitas yang tidak digunakan secara optimal. Idealnya, evaluasi suatu program harus dilakukan untuk memastikan bahwa investasi tersebut digunakan secara lebih tepat, misalnya dengan menambahkan ventilasi atau sistem pendingin untuk menyesuaikan suhu di dalam rumah bibit, atau mencari solusi lain yang lebih tepat guna. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang

diinvestasikan dalam program benar-benar mendukung tujuan program P2L dan kesejahteraan anggota KWT secara efektif

Dalam penelitian ini, kelengkapan sarana dan prasarana merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program P2L karena hal ini berperan dalam mengevaluasi kemampuan anggota KWT untuk beradaptasi dengan teknologi pertanian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa baik KWT Mangifera Nuri maupun KWT Mentari telah mendapatkan pelatihan dari penyuluh lapangan dan pendamping terkait penggunaan teknologi khususnya untuk pengolahan hasil pascapanen. Pelatihan yang diberikan kepada anggota tersebut menunjukkan bahwa telah adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok dalam menggunakan teknologi pertanian. Mengingat bahwa mayoritas anggota KWT tidak mempunyai latar belakang pertanian, maka para anggota belajar secara mandiri untuk memahami penggunaan peralatan tersebut. Kemampuan anggota KWT Mangifera Nuri maupun KWT Mentari untuk belajar mandiri mencerminkan adanya adaptasi yang baik terhadap keterbatasan yang ada.

Menurut hasil penelitian melalui wawancara, informan 3 (tiga) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program P2L, baik KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari mendapatkan bantuan tenaga laki-laki untuk menangani pekerjaan berat, seperti pembangunan rumah bibit dan pemeliharaan pekarangan. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa program P2L telah beradaptasi dengan memanfaatkan sumber daya eksternal untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fisik anggota KWT yang mayoritas adalah perempuan. Adaptasi ini juga mencerminkan fleksibilitas dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, proses adaptasi dalam program P2L di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat beberapa bentuk adaptasi yang dilakukan, seperti penggunaan tenaga laki-laki untuk menangani pekerjaan berat dan pelatihan bagi anggota KWT terkait teknologi pertanian, namun masih terdapat keterbatasan yang menghambat efektivitas program, seperti penggunaan sarana rumah bibit yang tidak optimal. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi teknologi belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan.